BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Sejarah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat adalah kelanjutan dari organisasi sejenis yang semula sudah ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, dengan nama Kantor Pusat Pengolahan Data (Puslahta) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Keberadaan puslahta di Jawa Barat dimulai pada tahun 1977, yaitu dengan adanya Proyek Pembangunan Komputer Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Proyek tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan sarana prasarana dalam rangka memasuki era komputer. Perkembangan selanjutnya, pada tanggal 8 April 1978 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78 diresmikan pembentukan/pendirian Kantor puslahta Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang berkedudukan di jalan Tamansari No. 57 Bandung.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78, maka pada tanggal 29 Juni 1981 pendirian Kantor puslahta dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan puslahta Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Dengan kedua Peraturan

Daerah tersebut keberadaan puslahta di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat semakin berperan, khususnya dalam melaksanakan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah di bidang komputerisasi. Keberadaan kedua Peraturan Daerah tersebut tidak mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, sehingga keberadaan puslahta di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat kedudukan organisasi menjadi non structural. Keberadaan Puslahta Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada masa itu telah banyak dirasakan manfaatnya selain oleh lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga oleh instansi lain dalam bentuk kerja sama penggunaan mesin computer *International Business Machines* (IBM) S-370/125 seperti:

1. PT DI (PT Dirgantara Indonesia).
2. PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api).
3. ITB (Institut Teknologi Bandung).
4. Dan pihak Swasta lainnya.

Perjalanan waktu yang cukup panjang, yaitu lebih kurang empat belas tahun sejak puslahta didirikan, pada tanggal 27 Juni 1992 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 21 Tahun 1992 Organisasi puslahta Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dibubarkan. Di dalam salah satu pasal Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun 1992 dinyatakan bahwa tugas dan wewenang puslahta dialihkan ke Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pada tanggal yang sama dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun 1992 tentang Pembubaran puslahta Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, keluar Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 22 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai pelaksana dari Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor : 5 tahun 1992 tentang pembentukan KPDE Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1992 tentang KPDE, pada tanggal 30 Juni 1993 keluar persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dengan Nomor : B-606/I/93 perihal Persetujuan KPDE untuk Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan keluarnya Surat Persetujuan menpan tersebut, maka untuk mengukuhkan Keputusan Gubernur Nomor 22 Tahun 1992 diajukan Rancangan Peraturan Daerahnya, dan akhirnya pada tanggal 21 Juni 1994 berhasil ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 4 tahun 1994 tentang Pengukuhan Dasar Hukum Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Nomor 5 tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Selanjutnya kedua Peraturan Daerah tersebut diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan, dan pada tanggal 10 Juli 1995 keluar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 1995 tentang Pengesahan

Peraturan Daerah Nomor : 4 dan Nomor : 5 Tahun 1994, dengan demikian KPDE Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat secara resmi menjadi salah satu Unit Pelaksana Daerah yang struktural.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 16 Tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah (bapesitelda) sebagai pengembangan dari Kantor Pengolahan Data Elektronik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 22 Tahun 1992 dan dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 1994. Sedangkan KPDE itu sendiri merupakan pengembangan dari Puslahta Provinsi Jawa Barat yang berdiri pada tanggal 8 April 1978 melalui Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat No. 294/OK.200-Oka/SK/78, dan keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1981 tanggal 29 Juni 1981.

3.1.2 Dasar Hukum Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat memiliki dua dasar hukum yang meliputi keputusan Presiden dan tentang peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia ;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat.

3.1.3 Nomenklatur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat bisa dikatakan sebutan Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika (Bapesitelda). Telematika singkatan dari Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, maka Bapesitelda Provinsi Jawa Barat diganti menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat disingkat Dinaskominfo, yang berlokasi di Jalan Tamansari No. 55 Bandung.

Perubahan ini merupakan kenaikan tingkat dan memiliki ruang lingkup serta cakupan kerja lebih luas. Sasarannya tidak hanya persoalan teknis, tapi juga kebijakan, baik hubungannya kedalam maupun menyentuh kepentingan publik khususnya dibidang teknologi informasi. Platform dinas, maka dinaskominfo dapat mengeluarkan regulasi mengenai teknologi informasi dalam kepentingan Provinsi Jawa Barat, terutama pencapaian Jabar *Cyber Province* Tahun 2012.

Berdasarkan Perda tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika berada diperingkat 20 dengan sruktur organisasi sebagai berikut di bawah ini.

1. Kepala
2. Sekretariat, membawahkan :
    a. Sub.Bagian Perencanaan dan Program
    b. Subbagian Keuangan;
    c. Subbagian Kepegawaian dan Umum;

3. Bidang Pos Dan Telekomunikasi, membawahkan :

   Seksi Pos Dan Telekomunikasi;

   a. Seksi Monitoring dan Penetiban Spektrum Frekuensi;

   b. Seksi Standarisasi Pos Dan Telekomunikasi;

4. Bidang sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi, membawahkan :

   a. Seksi Komunikasi Sosial ;

   b. Seksi Komunikasi Pemerintah Dan Pemerintah dareah;

   c. Seksi Penyiaran Dan Kemitraan Media;

5. Bidang Telematika, membawahkan;

   a. Seksi Pengembangan Telematika;

   b. Seksi Penerapan telematika;

   c. Seksi Standarisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika

6. Bidang Pengolahan Data Elektronik, membawahkan:

   a. Seksi Kompilasi Data ;

   b. Seksi Integrasi Data ;

   c. Seksi Penyajian Data dan Informasi.

7. Balai LPSE

   a. Tata Usaha LPSE

   b. Layanan Informasi LPSE

   c. Dukungan dan Pendayagunaan TIK LPSE

3.1.4 Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Seiring dengan pesatnya laju kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Barat maka dengan ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk mengfasilitasi kebutuhan tersebut yang sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinaskominfo) Provinsi Jawa Barat menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat Jawa Barat yang terdiri dari :

1. LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Regional Jawa Barat; M-CAP;
2. Internet Publik;
3. Perijinan Jasa Titipan;
4. Hotspot 3 Titik;
5. Ijin Jaringan Komunikasi Bawah Tanah;
6. *Video Conference*.

3.1.5 Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Terdapat tiga fungsi Dinas Komunikasi dan Infotmatika Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaran pemerintah di Jawa Barat ini, yaitu:

1. Penyelenggaraan perumusan, penetapan pengaturan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan teknis urusan teknis pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi, telematika, serta pengolahan data elektronik.
2. penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian komunikasi dan informatika meliputi pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika,serta pengolahan data elektronik
3. Penyelengaraan koordinasi dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;

3.1.6 Visi Dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Visi, adalah rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi pemerintahan yang ingin dicapai di masa depan, Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan *want to be* dari organisasi pemerintahan. Visi juga merupakan hal yang sangat krusial bagi pemerintahan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang.

Misi, adalah rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa.

Berikut Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat untuk mementukan tujuannya, yaitu:

Berikut ini adalah Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat yaitu:

Terwujudnya masyarakat informasi Jawa Barat melalui penyelenggaran komunikasidan Informatika yang efektif dan efisien.

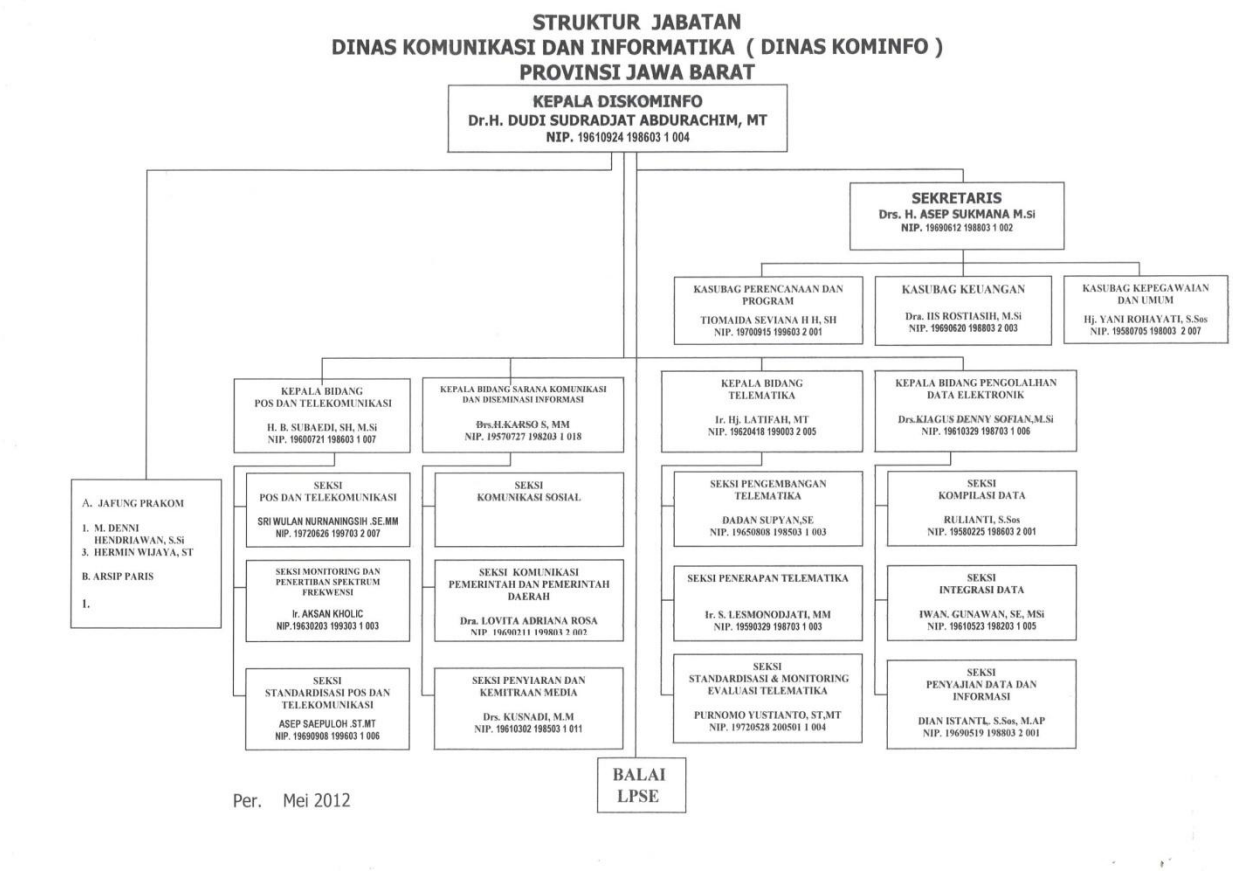
Berikut ini adalah Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, yaitu:

1. Meningkatkan sarana dan prasana serta profesionalisme sumber daya aparatur bidang Komunikasi dan Informatika;
2. Mengoptimalkan pengelolaan pos dan telekomunikasi;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana Komunikasi dan Informasi pemerintah dan masyarakat, serta melaksanakan diseminasi informasi;
4. Mewujudkan layanan online dalam penyelenggaraan pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi serta mewujudkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
5. Mewujudkan pengelolaan data menuju satu data pembangunan untuk Jawa barat.

3.1.7 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari seorang Kepala Dinas (Eselon II), seorang Sekretaris Dinas (Eselon III), 4 (empat) orang Kepala Bidang (Eselon III), dan 15 Kepala Seksi (Eselon IV).

Gambar 3.1
Struktur Organanisasi Dinaskominfo Privinsi Jawa Barat



(Sumber : Dinaskominfo Jawa Barat, 2012)

Sesuai struktur organisasi di atas bahwa pelayanan M-CAP tersebut tidak semua pihak yang ada di bagian unit kerjanya, hanya pada bagian bidang telematika, struktur organisasi di atas merupakan struktur organisasi keseluruhan unit kerja yang berada di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan satu kesatuan untuk melayani masyarakat Provinsi Jawa Barat.

3.1.8 Gambaran Umum M-CAP Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Barat

M-CAP merupakan aplikasi yang mempunyai peran yang sangat penting dalam hal pelayanan publik. M-CAP ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam pelayanan terhadap masyarakat yang kurang mengerti tekhnologi masa kini.

M-CAP dalam implementasinya terdiri dari adanya komponen yang berupa jaringan, *LCD (Liquid Crystal Display),* 6 Unit *Computer*, dan Jaringan internet *Wireles, LAN (Local Area Network)* tentang dengan menggunakan mobil elf berukauran mini Bus yang memberikan berbagai informasi kepada msayarakat khususnya masyarakat yang awam dan belum mengerti tentang tekhnologi. Aplikasi M-CAP dibuat dalam rangka pelayanan tentang segala tekhnologi.

3.1.8.1 Fungsi M-CAP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Terdapat empat fungsi M-CAP Dinas Komunikasi dan Infotmatika Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaran pemerintah di Jawa Barat ini, yaitu:

a. Unit pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
b. Unit layanan Akses internet bagi sekolah dan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan Jawa Barat.
c. Unit layanan Akses teleponi dan fax kegiatan sekolah dan masyarakat
d. Unit layanan diseminasi informasi dan audio-visual.

3.1.8.2 Tujuan M-CAP Dinas Komunikasi dan Infotmatika Provinsi Jawa Barat

Terdapat tiga tujuan M-CAP Dinas Komunikasi dan Infotmatika Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaran pemerintah di Jawa Barat ini, yaitu:

a. Memfasilitasi pengenalan dasar *e-literacy* untuk warga masyarakat di perdesaan, pinggiran kota, kawasan perbatasan dan desa tertinggal.
b. Memfasilitasi pembelajaran berbasis elektronika/computer (*e-learning*) bagi kelompok termarginalkan atau institusi yang belum terjangkau layanan tetap.
c. Memfasilitasi pengumpulan data dan statistik di lapangan untuk keperluan perencanaan nasional dan daerah dibidangnya.

3.1.8.3 Sasaran M-CAP Dinas Komunikasi dan Infotmatika Provinsi Jawa Barat

Pengenalan *ICT (Information Communication Technology)* dan pemberdayaan telematika bagi kelompok pemuda, remaja, baik disekolah maupun diluar sekolah,dan kelompok masyarakat. Untuk optimalisasi, perlu dukungan kerjasama dan kemitraan strategis dengan berbagai pihak guna menjadikan M-CAP sebagai sentral pembelajaran masyarakat. Kehadiran M-CAP diharapkan membantu mengatasi kesenjangan digital sekaligus menumbuhkan komunitas yang kreatif melalui pengembangan kontent *Website, Blogging* dan Forum.

3.1.8.4 Program Layanan M-CAP Dinas Komunikasi dan Infotmatika Provinsi Jawa Barat

Program layanan M-CAP diharapkan dapat menyentuh daerah daerah terpencil, desa-desa pinggiran dan sekolah-sekolah yang memang belum terjangkau oleh layanan koneksi internet. M-CAP merupakan fasilitas yang berfungsi sebagai Mobil Internet Keliling untuk melayani dan membantu dalam mencerdaskan masyarakat melalui dunia maya dan *ICT*. Berikut program pengenalam pelayanan M-CAP kepada masyarakat:

a. Pengenalan *ICT* ke sekolah dan pondok pesantren yang belum terjangkau oleh layanan koneksi internet.
b. Pendampingan Masyarakat, pengenalan penggunaan internet, Pengenalan internet untuk desa bordering, perpustakaan maya, *e-library*, *e-learning*.
c. Memberikan dukungan terhadap acara tingkat nasional atau daerah, acara adat, pesta kampung, dan pameran.
d. Sosialisasi Pengenalan dan penggunaan *Open Source Software*.
e. Workshop atau seminar, kerja sama dengan Instansi lain atau Panitia Workshop atau Seminar.
f. Koordinasi lapangan dengan kecamatan dalam pengembangan content webblog masing-masing kecamatan.
g. Pembuatan group di *facebook* untuk memberi kemudahan masyarakat dalam berkoordinasi dan memberikan *feedback* ke pengelola M-CAP.
h. Pembuatan webblog yang khusus mempublish perjalanan dan kegiatan M-CAP.

i. Pengenalan, pelatihan, pendampingan, untuk masyarakat di desa terpencil yang jauh dari jangkauan atau *access* internet.

j. *Coaching*, pelatihan langsung praktek lapangan.

k. Memfasilitasi KKN (Kuliah Kerja Nyata) Mahasiswa di Desa Lokasi.

l. Penanggulangan Bencana, sebagai Media informasi *online* pada penanggulangan bencana on location.

3.1.9 Dasar Hukum M-CAP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding – MoU*) Antara Direktorat Pemberdayaan Telematika, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dan Kepala Badan Arsip Data Elektronik (KBADE) dan Perpustakaan Kota Bandung Nomor 04/MoU-MCAP/DJAT.5/KOMINFO/12/2010 Nomor 415.4/03972 Tahun 2010 Nomor 415.4/03973 Tahun 2010 tentang implementasi pemanfaatan bantuan M-CAP berperangkat komputer jaringan berbasis *Open Source Software* dalam rangka pemberdayaan telematika masyarakat untuk mengatasi kesenjangan digital dan mengentaskan kemiskinan tanggal 12 Desember 20010 dinyatakan bahwa para pihak akan menjalin komunikasi, koordinasi untuk pertukaran informasi dan data secara berkala atau melaksanakan forum lain yang dinilai perlu, untuk memecahkan masalah terkait dengan pelaksanaan pemanfaatan serta pengembangan operasional M-CAP.

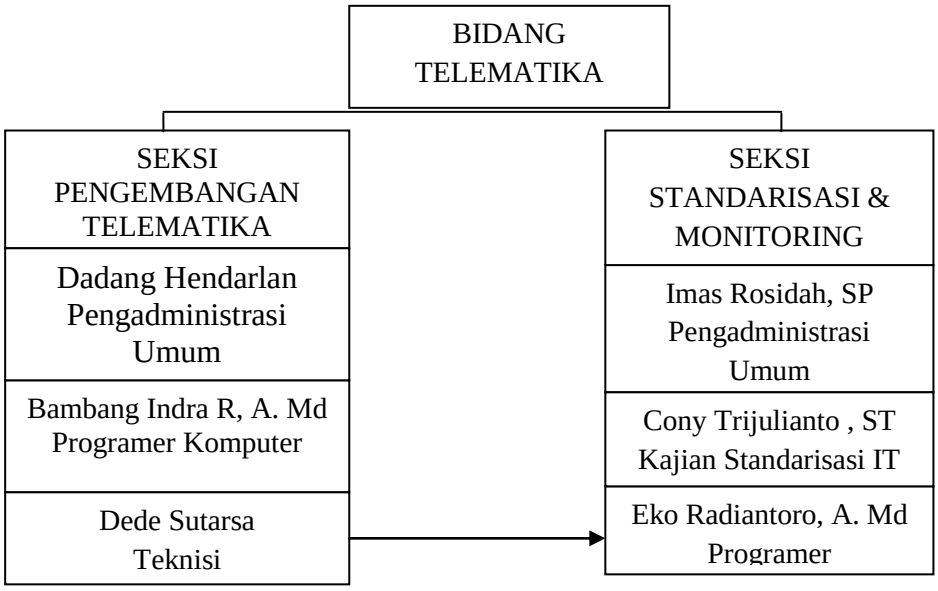
Terakit dengan jalinan komunikasi dan koordinasi untuk pertukaran informasi dan data secara berkala terkait pelaksanaan pemanfaatan M-CAP perlu

disusun laporan pemanfaatan M-CAP. Laporan pemanfaatan M-CAP disusun sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung dalam mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan telematika bagi peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan warga sesuai arahan program dan kebijakan Pusat dan Daerah sebagaimana perwujudan komitmen Nota Kesepahaman sebagaimana tertuang dalam ketentuan Berita Acara Serah Terima Barang (Sementara) No. 06/BAST/M-CAP/DJAT.5/KOMINFO/12/2010 tanggal 12 Desember 2010.

3.1.10 Struktur Organisasi Pengelolaan Pelayanan M-CAP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Pengelolaan atau yang mengoperasikan unit M-CAP di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dapat dilihat di bawah ini:

Gambar 3.2
Struktur Organisasi Pengelolaan Pelayanan M-CAP di Bidang Telematika



(Sumber: Dinaskominfo Jawa Barat, 2012)

Berdasarkan struktur organisasi di atas berikut susunan-susunan tentang pengelolaan pelayanan unit M-CAP di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat:

1. Seksi Pengembangan Telematika, yang terdiri dari:
    a. Dadang Hendarlan Sebagai Pengadministrasi
    b. Bambang Indra R, A. Md sebagai Programer Komputer
    c. Dede Sutarsa sebagai Teknisi
    d. Eko Radiantoro, A. Md sebagai Programer Komputer
2. Seksi Standarisasi Monitoring
    a. Imas Rosidah, SP sebagai Pengadministrasi Umum
    b. Cony Trijulianto , ST sebagai Kajian Standarisasi IT

3.1.11 Tampilan dan Mekanisme Pelayanan M-CAP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Berikut ini adalah tampalin awal M-CAP ketika aparatur Dinaskominfo memperkenalkan ke Masyarakat tentang tatacara pemakaiannya dan fungsi M-CAP itu sendiri bagi masyarakat.

Gambar 3.3
Tampilan Mobil M-CAP



(Sumber: Dinaskominfo Jawa Barat, 2012)

Selanjutnya setelah pengenalan M-CAP diberikan pada masyarakat, aparatur memberitahu dan menjelaskan apa yang terdapat dan apa yang harus dilakukan, seperti fasilitas-fasilitas yang terdapat pada M-CAP dan mekanismenya. Berikut adalah fasilitas yang terdapat pada mobil M-CAP:

Gambar 3.4
Fasilitas M-CAP

NO	NAMA BARANG	SERIAL NO.	KET
1	Generator 4000 watt - Yamaha EF4000FW	301173	
2	UPS1500 VA - APC BR 1500i	NB0807031157	
3	Deskbook - Advan D7T-752	1. A2138H0288230090	
		2. A2169H0298230030	
		3. A22750348230079	
		4. A22750348230013	
		5. A22750348230097	
		6. A22750348230075	
4	Microsoft Windows XP Profesional	RTHWQ - G4YXQ - TQHHH - KKCWF - DT248	
5	Wireless Access Point - Mikronet SP918GK	V613311255	
6	Autoswitch - Aten AF142	Z384H206ACG0639	
7	CDMA Modem with Antenna External - Multitech Antenna Outdoor		Belum Terpasang
8	Multfunction Printer - HP Office Jet 4335 Al-in-one	CN86KGN174	
9	Printer POS - Epson LX-300 + II	G8QY117912	
10	LCd TV 37" - LG303SU	812INNG8815959	
11	Home Theatre - LG - HT303SU	812INLV056800	
	DVD Player		
	Subwoofer + Speaker		
12	Perangkat Wartel - Quasar Wartel TUT 8E		
	Perangkat 2KBU		
	Cell2 Phone CDMA		
	Extra Display LED		
	Pesawat Telephone	1. 8ICMB597188 2. 8ICMB584710	
	Antena Parabola Outdoor 2 (dua) unit		
13	Perangkat Faximile - Quasar Faximile CDMA		
	Perangkat Faximile wartel		
	Antenna Outdoor	2805, 2835, 2853, 2820	

(Sumber: Dinaskominfo Jawa Barat, 2012)

Fasilitas M-CAP dilengkapi AC kendaraan, Genset, 6 Perangkat Komputer, *LCD, Wireless Access Point*, 8 *Port Switch*, Pemutar *video* melalui *LCD TV* (*VCD,DVD*), sound system dan di areal M-CAP juga dapat online internet (*WiFi*) dll. Setelah silengkapi dengan fasilitas sesuai gambar di atas maka aparatur melakukan mekanisme pelayanan M-CAP kepada masyarakat, seperti:

Gambar 3.5
Mekanisme Pelayanan M-CAP



(Sumber: Dinaskominfo Jawa Barat, 2012)

Selanjutnya tahap penggunaan dan mekanisme seperti gambar di atas tentang pelayanan unit M-CAP oleh masyarakat, ada tahapan-tahapan awal ketika masyarakat menggunakan M-CAP, yaitu dengan cara di bawah ini:

1. Pengguna M-CAP wajib mengisi Tanggal-Hari-Tahun.
2. Nama Pemakai M-CAP

3. Tanda Tangan

Dengan cara ini dimaksudkan penggunaan pelayanan M-CAP pada masyarakat tidak terjadi kesalahpahaman, seperti penggunaaan M-CAP yang lebih dari dua kali, dikarenakan fasilitas Komuter pada M-CAP hanya terdiri dari enam unit, sehingga pengguna lain yang ingin menggunakan M-CAP tidak hanya satu atau dua orang tetapi lebih dari itu.

Ketika masyarakat memakai system informasi berbasis internet yaitu M-CAP akan diberikan pengarahan, karena untuk menjalankan internet hanya bisa situs-situs yang telah tersedia pada M-CAP dan tidak bisa sembarangan membuka situs karena telah di seting menggunakan IP (*Internet Protocol*) addres manual. Mekanismenya sebagai berikut:

1. Peserta atau calon pengguna datang, baik secara perorangan atau berkelompok, untuk dilayani berdasarkan urutan siapa datang dan tercatat pertama, mendapat layanan labih dahulu.
2. Dalam hal kedatangan peserta secara rombongan, maka Ketua rombongan mengatur tata urutan peserta atau calon pengguna.
3. Untuk mendapatkan layanan terjadwal, peminat dapat menyampaikan permohonan tertulis kepada pengelola M-CAP atau Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk tertib administrasi, maka setiap pemanfaatan jenis layanan M-CAP wajib dilakukan pencatatan secara tertib dan rapih oleh Tutor, Operator atau pengelola M-CAP.

5. Pelayanan pemanfaatan M-CAP pada dasarnya bebas biaya, untuk kepentingan publik sebagai kerjasama antara Pemerintah Daerah, Instansi teknis terkait, operator telekomunikasi ataupun perusahaan jasa internet dan para pihak. Sumber bantuan yang bersifat sah dan tidak mengikat, diharpkan dapart menutupi pembiayaan operasional M-CAP sebagai wujud tanggung jawab bersama. Apabila terpaksa dilakukan pengenaan biaya, diupayakan agar biaya ditekan seminimal mungkin dan hanya bersifat untuk menutup keperluan biaya operasional.
6. Berdasarkan catatan, maka Tutor, Operator atau pengelola M-CAP merakapitulasi dan melaporkan pemanfaatan M-CAP minimal 3 (tiga) bulanan dan disampaikan ke alamat :

   Kepada :

   Pengelola Program M-CAP Pemberdayaan telematika,

   Ditejen Aplikasi Telematika, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Jalan di Jl. Tamansari no. 55 Bandung (022)-2502898.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan dan menganalisa data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan keadaan yang nyata. Peneliti menggunakan metode deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang manajemen kinerja aparatur dalam pelayanan M-CAP di Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, serta mendeskripsikan sejumlah konsep yang berkenaan dengan masalah M-CAP tersebut. Berdasarkan metode tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang mempelajari dari tingkahlaku manusia, khususnya orang-orang yang diteliti. Pemahaman orang yang diteliti mengenai tingkah laku manusia, peneliti harus dapatn memahami proses interpretasi dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang diteliti.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.2.1 Studi Pustaka

Kegiatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis tentang pelayanan M-CAP. Peneliti dapat memperoleh informasi tentang teknik-teknik penggunaan pelayanan M-CAP terhadap masyarakat agar penelitian dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga pekerjaan peneliti tidak merupakan duplikasi.

3.2.2.2 Studi Lapangan

Peninjauan yang dilakukan langsung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat yang menjadi objek penelitian dengan tujuan yakni, mencari bahan-bahan sebenarnya, bahan-bahan yang lebih banyak, lebih tepat, lebih *up to date,* disamping itu peneliti juga melakukan suatu penelitian dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi non partisipan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti berada di luar subjek yang diteliti dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, sehingga peneliti dapat lebih mudah mengamati tentang data dan informasi yang diharapkan. Peneliti meneliti tentang manajemen kinerja aparatur dalam pelayanan M-CAP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat terhadap masyarakat Jawa Barat.

b. Wawancara *(Interview)*

Wawancara merupakan satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari informan yang bersangkutan. Dalam melakukan wawancara ini peneliti menyiapkan daftar pertanyaan agar isu yang akan digali tidak keluar dari konteks. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan terstruktur dengan alat bantu berupa laptop dan catatan-catatan lainnya. Untuk menggali informasi tambahan dari informan, peneliti melakukan dialog melalui tatap muka dengan cara merekam percakapan, telepon, *sms*, *email*, *Yahoo Massenger* dan melalui dan media *access* lainya.

3.2.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive*. Teknik penentuan informan yang telah ditentukan oleh bagian-bagian pelayanan unit M-CAP yang akan diambil sebagai anggota informan diserahkan

pada pertimbangan pengumpul data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

Penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan objek yang diteliti dan berdasarkan keterkaitan informan tersebut dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri informan yang berkaitan dengan manajemen kinerja aparatur pada pelayanan M-CAP di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Pengambilan informan penelitian yang berkaitan dengan manajemen kinerja aparatur berasal dari pejabat maupun pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

Pertimbangan penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan sesuai dengan informan yang bersangkutan dalam pelayanan M-CAP, ada dua penentuan yang dijadikan sebagai informan, yaitu:

Informan Aparatur:

1. Bambang Indra R, A. A.Md, yaitu sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan M-CAP juga sebagai programer komputer yang sedang berlangsung. Memberikan pembinaan, pengawasan dan mengevaluasi setiap aparaturnya ketika pelayanan M-CAP berlangsung.
2. Dede Sutarsa, yaitu sebagai operator dalam menjalan pelayanan M-CAP, karena dengan adanya operator tersebut proses berjalannya pelayanan M-CAP dapat berjalan dengan lancar.
3. Eko Radiantoro, A. Md, yaitu sebagai teknisi, dimana terjadi sebuah *problem* atau adanya kendala terhadap perangkat *hardware* maupun *software* informan inilah yang mengatasinya.

4. Informan yang berperan sebagai seksi lapangan, tidak hanya satu informan yang melakukan bagian lapangan tetapi terdiri dari:
    a. Cony Trijulianto, ST, sebagai pengemudi Unit M-CAP.
    b. Imas Rosidah, Sp, sebagai pengawas seksi lapangan ketika ada masyarakat menanyakan tentang *system* tatacara menggunakan pelayanan M-CAP tersebut.

Informan Masyarakat:

1. Rudi Saepuloh sebagai pengguna Mobile M-CAP serta sebagai penanggung jawab dilaksanakanya M-CAP.
2. Dodi Purwanto sebagai pengguna M-CAP, yang mengakses dan menggunakan unit M-CAP ini agar mengetahui penggunaan teknologi informasi.
3. Rosidah sebagai pengguna M-CAP, yang mengakses dan menggunakan unit M-CAP ini agar mengetahui penggunaan teknologi informasi.

3.2.4 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang peneliti ambil adalah penelitian kualitatif, yang merupakan proses untuk analisis data dalam penelitian ini. Menganalisa penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan diantaranya :

Pertama, Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara mendalam tentang pelayanan M-CAP tersebut di Dinas Komunikasi dan Infotmatika Provinsi Jawa Barat, dimana data tersebut diambil dengan alat bantu seperti media elektronik, *media access,* jejaring sosial dan lain-lain.

Kemudian dibuatkan transkipnya dengan mengubah hasil wawancara dari bentuk tulisan dari media *access* tersebut menjadi bentuk data secara *real*. Data yang telah didapat dibaca berulang-ulang agar penulis mengerti benar data atau hasil yang telah di dapatkan.

Kedua, peneliti menyusun sebuah kerangka awal analisis sebagai acuan dan pedoman dalam melakuakan *coding*. Dengan cara ini, peneliti kemudian kembali membaca transkip wawancara terhadap aparatur yang mengelola unit M-CAP dan melakukan perangkaian kata-kata untuk di jadikan bahan dijadikan skripsi, melakukan pemilihan data yang relevan dengan pokok pembicaraan terhadap aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat khusnya aparatur yang menenagani tentang pelayanan M-CAP.

Pada penelitian ini, analisis dilakukan terhadap sebuah kasus yang diteliti. Peneliti menganalisis hasil wawancara berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal diungkapkan oleh aparatur. Data yang telah dikelompokan tersebut oleh peneliti dicoba untuk dipahami secara utuh dan ditemukan tema-tema penting serta kata kuncinya. Sehingga peneliti dapat menangkap penagalaman, permasalahan, dan dinamika yang terjadi pada subjek.

Ketiga, menguji asumsi atau permasalahan yang terdapat pada pelyanan M-CAP terhadap data setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, peneliti menguji data tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pada tahap ini kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau kembali berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan dalam bab II, sehingga dapat

dicocokan apakah ada kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil yang dicapai.

Keempat, mencari alternatif penjelasan data setelah kaitan antara kategori dan pola data dengan asumsi terwujud, peneliti masuk ke dalam tahap penejelasan dan berdasarkan kesimpulan yang telah didapat dari kaitanya tersebut, peniliti merasa perlu mencari suatau *alternative* penjelasan tentang proses pelayanan M-CAP kepada masyarakat, apa permasalahannya dan bagaimana penyelesaiannya, Sebab dalam penelitian kualitatif memang selalu ada *alternative* penjelasan yang lain. Dari hasil analisis, ada kemungkinan terdapat hal-hal yang menyimpang dari asumsi atau tidak terfikir sebelumnya. Pada tahap ini akan dijelaskan dengan *alternative* lain melalui referensi atau teori-teori lain. *Alternatif* ini akan sangat berguna pada bagian pembahasan, kesimpulan dan saran.

Kelima, menulis kembali hasil penelitian penulisan data yang di dapat di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dalam penggunaan pelayanan M-CAP terhadap masyarakat, data-data yang telah berhasil dikumpulkan merupakan suatu hal yang membantu penulis unntuk memeriksa kembali apakah kesimpulan yang dibuat telah selesai. Dalam penelitian ini, penulisan yang dipakai adalah presentase data yang didapat yaitu, penulisan data-data hasil penelitian berdasarkan wawancara mendalam dan observasi dengan subjek dan *significant other*. Proses dimulai dari data-data yang diperoleh dari pelayanan M-CAP dan *significant other*, dibaca berulang kali sehinggga penulis mengerti benar permasalahanya, kemudian dianalisis, sehingga didapat gambaran mengenai penghayatan pengalaman dari subjek. Selanjutnya dilakukan

interprestasi secara keseluruhan, dimana di dalamnya mencangkup keseluruhan kesimpulan dari hasil penelitian.

3.2.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, yang beralamat di Jl. Tamansari No. 55 Bandung (022)-2502898.

Waktu penelitian ini ada Tujuh tahapan dengan perincian sebagai berikut:

1. Pengajuan Judul Penelitian kepada Dosen Koordinator, pada bulan Februari 2012.
2. Bimbingan Usulan Penelitian kepada Dosen Pembimbing, pada bulan Februari 2012.
3. Pengajuan surat kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat yang menjadi objek penelitian, pada bulan Maret 2012.
4. Pelaksanaan Seminar Usulan Penelitian, pada bulan April 2012.
5. Pelaksanaan penelitian di lapangan di Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat selama satu sampai tiga bulan, pada bulan Maret 2012.
6. Penulisan skripsi pada bulan April 2012.
7. Sidang skripsi pada bulan Agustus 2012.

Sedangkan waktu penelitian dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

Waktu / Kegiatan	Tahun 2012						
	Feb	**Maret**	**April**	**Mei**	**Juni**	**Juli**	**Agustus**
Pengajuan Judul Penelitian							
Pengajuan Usulan Penelitian							
Seminar Usulan Penelitian							
Pengajuan surat ke tempat penelitian							
Pelaksanaan penelitian							
Penulisan Skripsi							
Sidang Skripsi							